

**TIMBER REGULATION IN COMMUNITY
FOREST MANAGEMENT UNIT**

*(A Case Study in Selopuro And Sumberejo Village, Sub-District of Batuwarno
Wonogiri Regency, Province of Central Java)*

By:

Ratna Kurniawati¹
Ris Hadi Purwanto²
Ahmad Maryudi³

Forest certification is one of market that suppose to promote and support forest protection and sustainable forest management. Owing the likely increase on the demand for certified timber, there is a concern on the possible over harvest on certified forest management unit. This research aims to know timber regulation, to estimate allowable harvest using methods Von Mantel in a certified trust management unit.

The research was conducted in the two-LEI certified community forest unit in Selopuro and Sumberejo villages. Purposive sampling employed to estimate the timber stock of the forest area. The forest area of Sumberejo and Selopuro 38,11 Ha respectively.

The research reveals that the harvesting practice done by forest growers follow the sustainable principles that total harvest must not exceed the allowed level. In Selopuro the allowed harvest levels for teak, mahogany and acacia area 31,11 m³/Ha, 85,90 m³/Ha, and 2.82 m³/Ha respectively. Therefore, the annual allowable cut of Sumberejo forest area for teak, mahogany and acacia area 2823,45 m³, 56239,16 m³, and 5247,46 m³. Similarity, the annual allowable cut of selopuro forest the three species are 8174.77 m³, 22571.94 m³, and 741.01 m³ respectively. The annually harvest of the teak and mahogany in Selopuro area 296,35 m³/years and 174,67 m³/years. Accordingly, the annual actual harvest in Sumberejo area 140,38 m³/years, 118,61 m³/years. This means that the actual harvest do not exceed the allowable harvest, meaning that the current practices follow the sustainable yield principles.

Key words; certification, community forest, timber regulation, etat.

¹ Student in the Forest Management, Forestry Faculty the Gadjah Mada University

² Lecturer in the Forestry Faculty the Gadjah Mada University

³ Lecturer in the Forestry Faculty the Gadjah Mada University



PADA UNIT MANAJEMEN HUTAN RAKYAT

(Studi Kasus pada Hutan Rakyat Bersertifikat Lestari di Desa Selopuro dan Sumberejo, Kab. Wonogiri, Prop. Jawa Tengah)

Oleh:

Ratna Kurniawati¹

Ris Hadi Purwanto²

Ahmad Maryudi³

INTISARI

Sertifikasi hutan adalah salah satu pendekatan pasar yang diperkirakan mampu menawarkan mekanisme yang efisien dalam mendukung dan membiayai perlindungan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan mendapatkan sertifikat lestari, sebuah unit manajemen dipandang telah mengelola hutannya dengan prinsip-prinsip kelestarian. Namun disisi lain, dengan meningkatnya permintaan kayu dari hutan rakyat bersertifikat dikhawatirkan bisa mendorong Unit Manajemen untuk memanen kayu melebihi etatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produksi kayu pada unit manajemen hutan rakyat bersertifikat, potensi kayu hutan rakyat, menghitung besarnya etat tebangan pada pengelolaan hutan rakyat dan mengevaluasi realisasi tebangan di lokasi penelitian.

Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yaitu memilih dengan sengaja daerah yang sesuai dengan kasus yang akan diteliti. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan pada dua desa yaitu Desa Sumberejo dan Kelurahan Selopuro. Dari kedua desa tersebut dipilih tiga Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) yang aktif di dalam mengelola hutan rakyat. Untuk tiap lokasi masing-masing diambil lima belas responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan hutan rakyat bersertifikat di Desa Selopuro dan Sumberejo telah mengikuti prinsip kelestarian dengan menebang sesuai kebutuhan dan tidak melebihi *etat*. Di Desa Selopuro pemanenan yang diijinkan untuk kayu jati, mahoni dan akasia berturut-turut adalah 31,11 m³/Ha, 85,90 m³/Ha, dan 2.82 m³/Ha. Di Desa Sumberejo pemanenan yang diijinkan untuk kayu jati, mahoni dan akasia berturut-turut adalah 5,16 m³/Ha, 102,78 m³/Ha, dan 9,59 m³/Ha. Oleh karena itu, jumlah tebangan tahunan yang diijinkan untuk wilayah hutan Selopuro untuk kayu jati, mahoni dan akasia berturut-turut adalah 2823,45 m³, 56239,16 m³, dan 5247,46 m³. Wilayah hutan Sumberejo untuk ke tiga jenis diatas berturut-turut adalah 8174.77 m³, 22571.94 m³, dan 741.01 m³. Tiap-Tiap tahun pemanenan kayu jati dan mahoni di wilayah Selopuro sejumlah 296,35 m³/tahun dan 174,67 m³/tahun. Jumlah pemanenan pertahun di wilayah Sumberejo sejumlah 140,38 m³/tahun, 118,61 m³/tahun. Dari hasil penelitian diatas jumlah pemanenan tidak melebihi *etat* yang diijinkan, praktek yang dilakukan pengelola hutan saat ini telah mengikuti prinsip hasil lestari.

Kata kunci : Hutan rakyat, *etat*, pengaturan hasil, sertifikasi

¹ Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Jurusan: Manajemen Hutan

² Pembimbing Skripsi: Dosen Fakultas Kehutanan UGM

³ Pembimbing Skripsi: Dosen Fakultas Kehutanan UGM